**Analisis Yuridis Kewenangan Pembina Memberhentikan Pengurus
 Dan Pengawas Yayasan Sewaktu-Waktu
 (Studi Putusan Nomor: 238/PDT/2022/PT SBY)**

Zelika Annisa Putri¹, Mahmud Siregar², Detania Sukarja³, Dedi Harianto⁴

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

¹zelikaannisa510@gmail.com, ²mahmulsiregar@gmail.com, ³detasukarja@gmail.com,

⁴dedifhusu@yahoo.co.id

Abstrak

Konflik internal antar organ yayasan sering terjadi bahkan sampai berakhir di pengadilan. Penelitian ini menyoroti konflik internal pada yayasan Sosial Budi Mulia Abadi di Durabaya yang di putus pengadilan berdasarkan Putusan nomor: 661/Pdt.G/2021/PN.SBY dan Putusan nomor: 238/PDT/2022/PT SBY. Fokus penelitian ini ditujukan untuk menganalisis kaidah-kaidah hukum tentang wewenang Pembina memberhentikan Pengurus dan Pengawas yayasan, khususnya terkait legalitas Rapat Luar Biasa Pembina yang memberhentikan Pengurus dan Pengawas dan menganalisis kepastian hukum terhadap pemberhentian Pengurus dan Pengawas yayasan dengan menjadikan Putusan nomor: 661/Pdt.G/2021/PN.SBY dan Putusan nomor: 238/PDT/2022/PT SBY sebagai objek analisis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi putusan. Data sekunder berupa bahan hukum primer, dimana sekunder dan tersier menjadi sumber data utama yang dikumpulkan melalui studi pustaka dan dianalisis secara normatif kualitatif. Secara normatif berdasarkan Undang-Undang Yayasan Pembina memiliki kewenangan memberhentikan Pengurus dan Pengawas yayasan sebelum masa jabatan mereka berakhir. Rapat Luar Biasa Pembina Yayasan Sosial Budi Mulia Abadi adalah sah karena telah disetujui oleh ½ (satu per dua) dari anggota Pembina dimana hal ini telah ditentukan dalam Undang-Undang Yayasan dan Anggaran Dasar Yayasan. Di dukung dengan perubahan data yayasan yang telah diberitahukan dan diterima KemenkumHam dengan Nomor AHU-AH.01.06-0021612 Perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Sosial Budi Mulia Abadi tanggal 5 November 2020 yang menyebabkan gugatan Pengurus dan Pengawas telah daluarsa. Sehingga Putusan Hakim dalam Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 238/PDT/2022/PT.SBY dinilai tepat.

Kata kunci: yayasan, pemberhentian pengurus, pembina, pengawas.

Abstract

Internal conflicts between foundation organs often occur and even end up in court. This research highlights the internal conflict at the Budi Mulia Abadi Social Foundation in Durabaya which was decided by the court based on Decision number: 661/Pdt.G/2021/PN.SBY and Decision number: 238/PDT/2022/PT SBY. The focus of this research is aimed at analyzing legal rules regarding the authority of Trustees to dismiss Foundation Management and Supervisors, especially regarding the legality of the Extraordinary Meeting of Trustees which dismisses Management and Supervisors and analyzing legal certainty regarding the dismissal of Foundation Management and Supervisors by making Decision number: 661/Pdt. G/2021/PN.SBY and Decision number: 238/PDT/2022/PT SBY as the object of analysis. This research is normative legal research that is qualitative in nature with a legislative approach and decision studies. Secondary data is in the form of primary legal materials, where secondary and tertiary are the main data sources collected through literature studies and analyzed normatively qualitatively. Normatively, based on the Foundation Law, Trustees have the authority to dismiss the Foundation's Management and Supervisors before their term of office ends. The Extraordinary Meeting of Trustees of the Budi Mulia Abadi Social Foundation is valid because it has been approved by ½ (one half) of the members of the Trustees, where this has been determined in the Foundation Law and the Foundation's Articles of Association. Supported by changes in foundation data that have been notified and accepted by the Ministry of Law and Human Rights with Number AHU-AH.01.06-0021612 Regarding Acceptance of Changes in Data for the Budi Mulia Abadi Social Foundation on November 5 2020 which caused the Management and Supervisor's lawsuit to have expired. So the Judge's Decision in the Surabaya High Court Number: 238/PDT/2022/PT.SBY is considered correct.

Key words: foundation, dismissal of management, supervisor, supervisor.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 terkait Yayasan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 (selanjutnya disebut UU Yayasan), dalam Pasal 1 ayat (1) menerangkan bahwa yayasan adalah “sebuah badan hukum.¹ Hal ini berarti bahwa yayasan merupakan “subjek yang memiliki hak dan kewajiban secara mandiri dihadapan hukum”.² Sebagai badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yayasan mempunyai organ yang terdiri atas pembina, pengawas dan pengurus.³

Kegiatan sosial yang dilakukan yayasan diperkirakan muncul dari kesadaran masyarakat kalangan mampu yang memisahkan kekayaannya untuk membantu masyarakat yang mengalami kesusahan. Di pilihnya yayasan sebagai wadah untuk beraktivitas sosial tentu bukan tanpa alasan. Di banding dengan bentuk badan hukum lain yang hanya terkonsentrasi pada bidang ekonomi dan usaha, Yayasan dinilai lebih memiliki ruang gerak untuk menyelenggarakan kegiatan sosial seperti pendidikan, kesehatan serta keagamaan yang pada umumnya belum ditangani oleh badan-badan hukum lain.⁴

Yayasan sebenarnya lembaga yang berfungsi untuk mengelola kekayaan tertentu demi mencapai maksud dan tujuan dibentuknya yayasan tersebut. Artinya yayasan tidak digunakan sebagai wadah

untuk menjalankan suatu usaha dan tidak bertujuan demi atau mengejar keuntungan (walaupun dalam prakteknya ada saja keuntungan yang dapat diperolehnya). Prinsip nirlaba dan sosial pengabdian ini tampak dari ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Yayasan.

Terdapat berbagai kewajiban yang harus diwujudkan didalam penyelenggaraan yayasan diantaranya adalah tercapainya prinsip-prinsip sebagai syarat terpenuhinya yayasan sebagai badan privat yang juga tunduk pada prinsip *good corporate governance*. Penempatan prinsip-prinsip tata kelola yayasan yang baik sebagaimana pada prinsip *good corporate governance*, menjadi hal yang harus diterapkan. Prinsip-prinsip itu dikenal sebagai prinsip utama pada tata kelola yang baik pada badan hukum dan badan usaha dengan beberapa ketentuan dari adanya beberapa prinsip yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, keadilan dan kemandirian.⁵

Prinsipnya, mereka harus bekerja secara sukarela tanpa imbalan dalam bentuk apapun, baik gaji, upah maupun honor. Seperti halnya badan hukum lainnya, yayasan memiliki perangkat atau organ-organ. Pengurus merupakan organ yang mewakili yayasan baik di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan, kecuali dalam hal sebagaimana disebutkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pengurus tidak berwenang mengikat yayasan sebagai penjamin utang, mengalihkan kekayaan yayasan kecuali dengan persetujuan

¹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Pasal 1 ayat (1).

² Desi Handayani, Evi Haryani, Ida Ayu Putu Anggie, “Analisis Yuridis tentang Pendirian yayasan Pendidikan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan”, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Nomor 1, Volume 8, Tahun 2018, h. 3.

³ Mulhadi, *Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha DiIndonesia*, Edisi Pertama, Cetakan Ke-2, Rajawali Pers, Jakarta, h. 309.

⁴ Johannes Ibrahim, *Hukum Organisasi Perusahaan Pola Kemitraan dan Badan Hukum*, PT. Refika Adimata, Bandung, 2013, h. 58.

⁵ Mitra Bestari Mudjiyanto, “Jurnal Ilmu Administrasi Publik”, *Publisia*, Volume 1, Nomor 2, Oktober, Tahun 2016, h. 188.

Pembina dan membebani kekayaan yayasan untuk kepentingan pihak lain”.

Pengurus minimal beranggotakan seorang ketua, seorang sekretaris dan seorang bendahara, dengan masa jabatan 5 tahun dan setelahnya hanya dapat diangkat kembali selama 1 kali masa jabatan. Selain pengurus yang menjalankan kepengurusan yayasan, ada pula organ pengawas yang keduanya diangkat oleh organ pembina. Tak hanya mengenai struktur kepengurusan (dalam arti luas yang mencakup “pengurus” dan “pengawas”), pembina juga memiliki kewenangan lain diantaranya terkait misi (program kerja) yayasan, kekayaan yayasan, maupun ketentuan anggaran dasar lainnya (anggaran rumah tangga).⁶

Yayasan dalam perjalanannya juga dapat mengalami perubahan. Perubahan dapat meliputi perubahan anggaran dasar (kecuali perubahan maksud dan tujuan) maupun perubahan lainnya. Dari segi formalitasnya, menurut Undang-Undang Yayasan perubahan anggaran dasar terbagi 2, yaitu perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Menteri dan perubahan anggaran dasar yang cukup dilaporkan kepada Menteri.⁷

Berkenaan dengan perubahan pengurus maupun pengawas, Undang-Undang Yayasan mewajibkan yayasan untuk melaporkan perubahannya kepada Menteri. Namun ada perbedaan dengan perubahan anggaran dasar. Perubahan kepengurusan tak harus dibuatkan dalam bentuk akta notariil (akta notaris), melainkan dapat dilakukan

dengan dokumen keputusan rapat pembina (surat bawah tangan).⁸

Selain pengurus, di dalam yayasan terdapat pula pembina sebagai salah satu unsur organ yayasan. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Yayasan menyebutkan bahwa Pembina adalah “organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas oleh Undang-Undang” dan kewenangan pembina meliputi :

1. Keputusan untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Yayasan;
2. Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas yayasan;
3. Penetapan kebijakan umum Yayasan;
4. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.⁹

Posisi Pembina berperan besar dalam menentukan kehidupan sebuah yayasan. Agar dalam pelaksanaannya yayasan dapat mencapai maksud dan tujuannya yang bergantung pada program dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pembina. Oleh karena itu, Pembina dalam mengambil keputusan harus dilakukan secara hati-hati dan didasarkan pada studi tentang apa dan bagaimana visi dan misi yayasan diimplementasikan sesuai dengan, dan untuk menjawab, tantangan jaman.¹⁰

Adanya Pembina yayasan yang melakukan pelanggaran hukum berupa penyimpangan kekuasaan dapat dijumpai pada beberapa kasus salah satunya pada Putusan nomor: 43/Pdt.G/2016/PN.Mgg yang menyatakan perbuatan Pembina memberhentikan Pengurus pada Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang adalah

⁶ Irma Fatmawati, *Hukum Yayasan Pendidikan*, CV. Budi Utama, Sleman, 2020, h. 172.

⁷ Nurul Hidayanti, “Distribusi Aset Dan Kekayaan Yayasan: Perspektif Perundang-Undangan”, *Universitas Andi Djemma Palopo*, Volume 6, Nomor 2, Desember, Tahun 2017, h. 213.

⁸ *Ibid.*

⁹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Pasal 28 ayat (2).

¹⁰ Mas Ritonga, *Hukum Perusahaan Dan Bentuk-Bentuk Perusahaan Di Indonesia*, Guefedia, Jakarta, 2022, h. 153.

perbuatan melawan hukum karena alasan Pembina melakukan pemberhentian terhadap Pengurus adalah adanya pelanggaran undang-undang yang menyimpang dari maksud dan tujuan Yayasan, yang merugikan Yayasan karena Pengurus menggunakan uang Yayasan untuk kepentingan Pengurus pribadi. Dalam pertimbangannya Hakim menyatakan alasan tersebut termasuk alasan yang belum pasti dan masih memerlukan kejelasan. Oleh karena itu Pembina dalam memberhentikan Pengurus, harus melalui prosedur atau tahapan terlebih dahulu yaitu berupa teguran baik lisan maupun tertulis.¹¹

Pembina Yayasan dalam melaksanakan kewenangannya harus sesuai dengan aturan yang ada, baik yang tercantum di dalam anggaran dasar maupun yang sudah ditentukan dalam UUY. Namun khususnya dalam kewenangan pembina yang dapat memberhentikan Pengurus dan Pengawas Yayasan bisa menimbulkan permasalahan hukum seperti pada perkara dalam Putusan nomor: 661/Pdt.G/2021/PN.SBY dan Putusan 238/PDT/2022/PT.SBY berkenaan dengan konflik intern Yayasan Sosial Budi Mulia Abadi di Surabaya. Dalam putusan ini Pembina digugat oleh Pengurus dan Pengawas. Dalam gugatannya Pengurus dan Pengawas yayasan tidak terima dan dirugikan atas keputusan Pembina yang memberhENTIKANNYA dengan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu sebelum masa jabatannya berakhir melalui Rapat Luar Biasa.

Pengurus dan Pengawas yayasan meyakini telah melaksanakan tugas dan kewajibannya secara benar sesuai dengan anggaran dasar yayasan dan tidak pernah melakukan perbuatan yang merugikan yayasan. Pengurus dan Pengawas yayasan

mendalilkan bahwa keputusan Pembina memberhentikan mereka tidak sesuai dengan anggaran dasar dan Pasal 32 ayat (4) UUY. Pemberhentian yang dilakukan Pembina tidak sah karena surat undangan Rapat Pembina baru dikirimkan pada tanggal 29 Oktober 2020 sedangkan Rapat Pembina dilakukan pada tanggal 04 November 2020. Sehingga kurang dari 7 (tujuh) hari sejak surat undangan dikirimkan.

Hal ini tidak sesuai dengan Anggaran dasar Yayasan Sosial Budi Mulia Abadi sebagaimana diatur pada Pasal 10 ayat 3 yang berbunyi :

“panggilan untuk Rapat Pembina harus dilakukan dengan surat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan menyebutkan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat serta keterangan singkat tentang hal-hal yang dibicarakan”.

Pembina mengemukakan bahwa pemberhentian tersebut dilakukan karena Pengurus tidak membuat laporan kegiatan maupun laporan keuangan 2 tahun berturut-turut yang diserahkan kepada Pembina. Pengurus juga tidak pernah melakukan rapat Pengurus karena sering berada diluar negeri. Hal ini juga menyebabkan kegiatan yayasan menjadi lumpuh, karena dalam Anggaran Dasar Yayasan tertera bahwa setiap kegiatan Yayasan harus melalui persetujuan Ketua Yayasan, terlebih lagi wakil Ketua Yayasan dan Sekretaris Yayasan telah meninggal dunia. Sehingga jelas Ketua Pengurus tidak menjalankan tugasnya dengan profesional dan transparan.

Pengawas Yayasan juga dianggap telah lalai dalam mengawasi Ketua Pengurus Yayasan sehingga menyebabkan kerugian Yayasan, maka Pengawas Yayasan turut

¹¹ Putusan nomor: 43/Pdt.G/2016/PN.Mgg

diberhentikan dalam Rapat Luar Biasa yang dilakukan Pembina. Setelah menimbang dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan keputusan pembina dalam memberhentikan pengurus Yayasan adalah perbuatan melawan hukum, lalu Pembina Yayasan mengajukan banding dengan nomor putusan 238/PDT/2022/PT.SBY dan Pengadilan Tinggi menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 661/Pdt.G/2021/PN.SBY. Dalam putusannya Pengadilan Tinggi membenarkan tindakan Pembina Yayasan sehingga dianggap tindakan Pembina melakukan Rapat Luar Biasa tidaklah melawan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dianggap perlu dilakukan kajian terhadap Putusan nomor: 661/Pdt.G/2021/PN.SBY dan Putusan 238/PDT/2022/PT.SBY terkait dengan pemberhentian pengurus dan pengawas yang dilakukan oleh Pembina berdasarkan keputusan Rapat Luar Biasa Pembina Yayasan dalam hal pengurus dan pengawas tidak melakukan tugas dan kewajibannya dalam jabatannya sebagai organ yayasan sehingga menyebabkan berhentinya kegiatan yayasan yang menyebabkan yayasan mengalami kerugian. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlu dikaji hak Pembina dalam memberhentikan Pengurus dan Pengawas dalam bentuk penulisan tesis hukum dengan judul : “Analisis Yuridis Kewenangan Pembina Memberhentikan Pengurus dan Pengawas Yayasan Sebelum Masa Jabatan Pengurus Dan Pengawas Berakhir (Studi Putusan Nomor : 238/PDT/2022/PT.SBY)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan diteliti dan dibahas secara lebih mendalam pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan yang mengatur kewenangan Pembina yayasan dalam memberhentikan Pengurus dan Pengawas yayasan sebelum masa jabatan Pengurus dan Pengawas berakhir?
2. Bagaimana legalitas Rapat Luar Biasa Pembina Yayasan yang memberhentikan Pengurus dan Pengawas pada Yayasan Sosial Budi Mulia Abadi?
3. Bagaimana kepastian hukum pemberhentian Pengurus dan Pengawas Yayasan dalam Putusan PN Nomor: 661/Pdt.G/2021/PN.SBY dan Putusan PT Nomor: 238/PDT/2022/PT.SBY?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor yang penting dalam penelitian untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian juga mempermudah pengembangan data guna kelancaran penyusunan penulisan hukum. Metode penelitian menurut Soerjono Soekanto pada hakikatnya adalah “memberikan pedoman tentang cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya”.¹²

Penelitian hukum adalah “suatu penelitian yang mempunyai objek hukum baik hukum suatu ilmu dan aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan 5, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, h. 13.

masyarakat".¹³ Penelitian hukum pada dasarnya merupakan :

suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa masalah hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya kecuali itu maka juga dilakukan menganalisisnya mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala bersangkutan.¹⁴

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan Undang-Undang Yayasan yang berkaitan dengan hak Pembina memberhentikan Pengurus dan Pengawas sewaktu-waktu. Yuridis normatif merupakan "penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah dan mengkaji teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini".¹⁵

b. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menurut Sugiyono, "Suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum".¹⁶

Sifat penelitian deskriptif analitis dipergunakan untuk menggambarkan suatu penyelesaian peristiwa hukum terkait hak Pembina memberhentikan Pengurus dan Pengawas sewaktu-waktu dan kesesuaian penerapan hukum oleh Majelis Hakim dengan UU Yayasan. Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.¹⁷ Maka digunakan metode deskriptif analisis karena dirasa cocok untuk dengan penelitian yang akan dilakukan.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah "penelitian yang dilakukan dengan menggunakan dan mengkaji serta menelaah peraturan Perundang-Undang yang pada penormannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan, baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan".¹⁸ Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan berhubungan dengan permasalahan atau isu hukum yang sedang dihadapi dan diteliti.¹⁹ Pendekatan perundang-undangan ini dipergunakan karena dalam penelitian ini permasalahannya

¹³ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Prenada Media Group, Depok, 2016, h. 16.

¹⁴ *Ibid*, h. 34.

¹⁵ Henni Muchtar, "Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Universitas Negeri Padang*, Vol. XIV, Nomor 1, Tahun 2015, h. 84.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, h. 29.

¹⁷ *Ibid*.

¹⁸ Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, UIN Suska Riau, Pekanbaru, 2015, h. 4.

¹⁹ Sella Marsellena Mercury, "Analisis Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan", *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, Volume 2, Nomor 2, September 2021, h. 71.

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan penelitian ini akan dilakukan dengan menelusuri beberapa kasus mengenai yayasan. Pada pendekatan kasus, selalu dimulai dengan mengkaji dan menganalisis berbagai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, atau mengikat (*inkracht van gewijsde*) sebagai yurisprudensi yaitu dengan mengkaji apa yang menjadi alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim sampai kepada putusan yang dikenal sebagai *ratio decidendi*.

²⁰ Pada pendekatan kasus harus dilakukan dengan menelaah pada putusan Pengadilan Negeri Nomor: 661/Pdt.G/2021/PN.SBY dan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 238/PDT/2022/PT.SBY yang selanjutnya dibandingkan dengan putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus yang dibahas, berikut beberapa putusan pengadilan yang terkait yaitu:

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor: 43/Pdt.G/2016/PN.Mgg. Dengan amar Putusan menyatakan perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dalam menerbitkan Surat Keputusan Pembina Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang No.042/PB-YKI/KEP/XI/2016 tentang pemberhentian Para Penggugat (Pengurus Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang masa bakti 2014-2019) tertanggal 6 November 2016 adalah Perbuatan Melawan Hukum dan Amar Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 359/PDT/2017/PT.SMG mengadili :

“Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 43/Pdt.G/2016/PN.Mgg yang dimohonkan banding”.²¹

- 2) Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 54/PDT/2021/PT DPS. Dengan amar putusan: menerima permohonan banding dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang dimohonkan banding dengan menghukum menolak gugatan Pembanding.²²

Kedua putusan diatas dalam kasusnya sangat sama dengan kasus pada penelitian ini, sehingga dapat menjadi acuan tambahan dan perbandingan dalam mempelajari kasus yang sedang diteliti.

1. Sumber Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui data primer dan data sekunder, data primer adalah “data yang diperoleh langsung dari sumber pertama”, sedangkan yang termasuk dalam data sekunder adalah “data yang dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap bahan kepustakaan, yang mencakup dokumen-dokumen resmi seperti buku-buku, hasil- hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya”.²³

Di dalam penelitian hukum, data sekunder terbagi menjadi 3 yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah “bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*,h. 93.

²¹ Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor: 43/Pdt.G/2016/PN.Mgg.

²² Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 54/PDT/2021/PT DPS.

²³ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, h. 172.

dan putusan-putusan hakim”.²⁴ Bahan hukum primer mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, berupa peraturan perundang-undangan yaitu Putusan Pengadilan Negeri, Putusan Pengadilan Tinggi, Undang-undang Yayasan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Yayasan, RIB (Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui) / HIR (*Herzein Inlandsch Reglement*), Putusan nomor: 661/Pdt.G/2021/PN.SBY dan Putusan nomor: 238/PDT/2022/PT SBY.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah “hasil kegiatan teoritik akademik, mengimbangi kegiatan-kegiatan praktek akademik²⁵ yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum tentang Yayasan”.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah “bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang relevan untuk melengkapi data dalam penelitian ini, yaitu seperti kamus umum, kamus hukum, dan internet”.²⁶ Serta bahan-bahan di luar bidang hukum yang berkaitan guna melengkapi data”.

2. Teknik dan Alat pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu “penelitian yang dilakukan melalui bahan-bahan kepustakaan berupa tulisan-tulisan ilmiah, jurnal dan laporan-laporan penelitian yang ada hubungannya dengan topik yang diteliti. Untuk mendapatkan hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya dalam penelitian ini”.²⁷

Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu Studi dokumen yang dilakukan dalam penelitian ini adalah “menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan-bahan kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier”.²⁸ Langkah-langkah yang ditempuh untuk melakukan studi dokumen dimaksud dimulai dari studi dokumen terhadap bahan hukum primer, baru kemudian bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menghimpun data yang berasal dari kepustakaan, berupa buku-buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan yang

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2006, h. 141.

²⁵ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, h. 42.

²⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya, Bayu Media Publishing, 2005, h. 340.

²⁷ Milya Sari, Asmendri, “Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Pendidikan IPA”, *Jurnal Natural Science*, Nomor 01, Volume 06, Tahun 2020, h. 23.

²⁸ Ida Farida, “Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif”, *Jurnal Sains dan Inovasi*, Nomor 06, Volume 01, Tahun 2010, h. 57.

ada hubungannya dengan masalah yang diteliti serta tulisan-tulisan yang terkait dengan Yayasan.

3. Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan

Mengingat penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif yang memusatkan perhatian pada analisis data kualitatif dan metode penarikan kesimpulan deduktif.

Teknik analisis data kualitatif yaitu :

metode analisis data dengan cara mengelompokkan, menyatukan dan memilih data yang diperoleh dari penelitian berdasarkan kualitas dan kebenarannya, kemudian disusun secara sistematis yang selanjutnya data yang diperoleh dari kepustakaan, berupa buku-buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan yang akan dikaji menggunakan metode berfikir secara deduktif untuk selanjutnya dihubungkan dengan teori-teori yang didapatkan dan dihasilkan dari studi kepustakaan (sekunder), kemudian dibuat kesimpulan yang berguna dan bermanfaat untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.²⁹

Analisa kualitatif dilakukan terkait adanya hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep serta data-data yang diperoleh juga merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap berasal dari teori-teori dan konsep yang didasarkan pada data-data yang telah dikumpulkan. Maka pengumpulan data utama ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan serta studi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

Selanjutnya dalam penelitian ini digunakan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu:

cara berpikir yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum, kemudian

dirunut kepada hal yang bersifat khusus dan dibuat suatu pernyataan kesimpulan atasnya dengan menggunakan ketentuan-ketentuan berdasarkan pengetahuan umum seperti teori-teori, dalil-dalil, atau prinsip-prinsip dalam bentuk preposisi-preposisi untuk menarik kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus yang ditemukan dalam penelitian ini.³⁰

II. Hasil Penelitian

A. Kewenangan Pembina Yayasan Memberhentikan Pengurus Dan Pengawas Yayasan Sebelum Masa Jabatan Pengurus Dan Pengawas Yayasan Berakhir

Pembina merupakan organ yayasan yang memiliki kewenangan atau kekuasaan yang mutlak dalam hal evaluasi dan pengamatan kinerja yang dilakukan Pengurus dan Pengawas. Bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Pembina Yayasan adalah berdasarkan Rapat Pembina.³¹

Menurut Henry P. Pangabean menyatakan bahwa Pembina adalah “tokoh yang berdedikasi penuh dengan kewenangan yang luar biasa”. Pengangkatan Pembina diatur dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Yayasan yaitu “yang dapat diangkat menjadi anggota Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah orang perseorangan sebagai pendiri Yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.”³²

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Yayasan jelas menerangkan bahwa Pembina adalah “organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus dan pengawas Yayasan oleh Undang-Undang ataupun Anggaran Dasar,

²⁹ Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 50.

³⁰ Mukti Fajar, *Op. Cit.*, h. 109.

³¹ Fajar Rachmad Dwi Miarsa, Cholilla Adhaningrum Hazir, “Rechtsvacuum Atas Pengaturan

Kekuasaan Pembina Yayasan”, *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan seni*, Vol. 5, No. 2, Oktober 2021, h. 381.

³² Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Pasal 28 ayat (3).

artinya pada dasarnya Pembina memiliki kewenangan yang lebih tinggi yang tidak dimiliki oleh Pengurus dan Pengawas Yayasan”.³³

Salah satu kewenangan Pembina adalah “melakukan pengangkatan dan pemberhentian Pengurus dan Pengawas yayasan”, hal ini terdapat dalam Pasal 28 ayat (2) poin (b). Selanjutnya dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Yayasan dijelaskan bahwa “Pengurus Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali”. Mengenai pemberhentian Pengurus Yayasan terdapat dalam ayat (4), dimana Pembina jugalah yang berhak melakukan pemberhentian terhadap pengurus Yayasan.³⁴

Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Yayasan juga menerangkan mengenai pengangkatan Pengawas oleh Pembina yaitu “Pengawas Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali”. Selanjutnya mengenai kewenangan Pembina dalam melakukan pemberhentian terhadap Pengawas terdapat dalam pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Yayasan yaitu “Pengawas yayasan diangkat dan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina”.³⁵

Di balik kewenangan Pembina dalam mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan Pengawas ada hal-hal yang harus diperhatikan agar dalam menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan UUY dan Anggaran Dasar yayasan, namun jika

tidak sesuai maka Pengadilan dapat membatalkan pemberhentian tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 34 ayat 2 jo Pasal 41 ayat 3 yaitu “dalam hal pengangkatan, pemberhentian dan penggantian pengurus dilakukan tidak sesuai dengan Anggaran dasar, atas permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum, Pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, penggantian dan pemberhentian tersebut dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pembatalan diajukan”.³⁶

Menurut Ateng Syafrudin Kewenangan adalah apa yang disebut kewenangan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang.³⁷ Kewenangan yang yang didapatkan Pembina dari jabatannya sebagai organ yayasan adalah kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang dan Undang-Undang pula yang membatasi kewenangan tersebut. Selama dalam menjalankan kewenangannya tidak melanggar Undang-Undang dan Anggaran dasar.

Pembina yayasan dapat memberhentikan pengurus yayasan dengan tujuan untuk menjaga kepentingan, integritas, dan efektivitas yayasan. Pemberhentian pengurus oleh pembina seharusnya selalu bertujuan untuk menjaga kepentingan dan tujuan yayasan, serta untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Hal ini merupakan langkah serius yang harus diambil setelah

³³ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Pasal 28 ayat (1).

³⁴ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Psa 32 ayat (1).

³⁵ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Pasal 44 ayat (1).

³⁶ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Pasal 41 ayat (3).

³⁷ Ateng Syafrudin, *Op., Cit.*, h. 22.

pertimbangan yang cermat dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan UUY.³⁸

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kewenangan Pembina dalam melakukan tugas dan kewenangannya haruslah sesuai dengan AD dan UUY, Anggaran Dasar dan UUY juga yang menjadi batasan dan aturan dalam menjalankan tugasnya. Keputusan Pembina dalam pengangkatan dan memberhentikan Pengurus dan Pengawas Yayasan bukanlah berdasarkan keputusan dirinya sendiri, melainkan berdasarkan keputusan rapat Pembina yayasan dan sesuai dengan Anggaran dasar juga UUY. Namun jika Pengurus dan Pengawas menemukan ketidak sewenangan dalam pemberhentian mereka, mereka dapat mengajukan permohonan pembatalan kepada Pengadilan untuk membatalkan pemberhentian atas jabatan mereka sebagai organ yayasan.

B. Sebab-Sebab Pengurus dan Pengawas Yayasan Dapat Diberhentikan Sebelum Masa Jabatannya Berakhir

Pengurus dan Pengawas merupakan organ yayasan yang sangat berperan penting dalam jalannya sebuah yayasan, terutama Pengurus bertanggung jawab sepenuhnya atas kepengurusan yayasan, baik untuk kepentingan maupun tujuan yayasan serta mewakili yayasan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pengurus bertanggung jawab secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan anggaran dasar.³⁹

Dengan demikian pengurus harus mampu menghindarkan yayasan dari tindakan-tindakan illegal yang bertentangan

dengan peraturan dan kepentingan umum serta bertentangan dengan kesepakatan yang dibuat dengan organ yayasan lain.

Besarnya tanggungjawab yang harus dilakukan oleh Pengurus dan Pengawas, membuat resiko yang diembannya juga semakin besar. Karena jika tidak terlaksana tanggungjawab dan kewenangan itu, Pengurus dan Pengawas dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir. Hal-hal yang dapat menyebabkan Pengurus dan Pengawas diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir berdasarkan Undang-Undang Yayasan adalah sebagai berikut:

- a. Jika terjadi kerugian yayasan yang menyebabkan kepailitan karena kesalahan dan kelalaian pengurus dan pengawas

Kesalahan, kelalaian, dan kesengajaan dalam hukum perdata selalu berhubungan dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum. Yang dimaksud dengan perbuatan hukum adalah “segala perbuatan subyek hukum (orang atau badan hukum) yang secara sengaja dilakukan sehingga menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban”.⁴⁰

Kesalahan sendiri memiliki 2 pengertian yaitu “terjadi karena unsur kesengajaan dan adanya kelalaian”. Sedangkan kelalaian adalah “suatu perbuatan, dimana si pembuatnya mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan orang lain”. Tugas juga kewenangan Pengurus dan Pengawas telah gamblang dijelaskan dalam UUY sehingga tidak ada alasan jika kedua organ yayasan ini melakukan hal-hal yang merugikan yayasan.⁴¹

Pasal 1365 KUH Perdata menjelaskan suatu perbuatan dikatakan melanggar

³⁸ Fajar Rachmad Dwi Miarsa, *Op., Cit.* h. 382

³⁹ Murni, Abdul Gani, “Tanggung Jawab Hukum Kepada Pengurus Yayasan Terhadap Failednya Suatu

Yayasan”, *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*, Volume 6, Nomor 1, Januari, Tahun 2020, h. 42.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

(melawan) hukum, apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya suatu perbuatan.
2. Perbuatan tersebut melawan hukum.
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
4. Adanya kerugian bagi korban.
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.⁴²

Maka jika pengurus atau pengawas didapati melakukan tindakan yang merugikan keuangan yayasan, pembina dapat mengambil langkah untuk memberhentikan mereka. Contohnya, penyalahgunaan dana Yayasan, penggunaan sumber daya yayasan untuk kepentingan pribadi, atau perilaku yang merugikan citra dan reputasi Yayasan.⁴³ Mengenai hal ini terdapat dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Yayasan yaitu Pasal 32 Ayat 1, Pasal 35 Ayat 5 dan Pasal 39 Ayat 1.

Pasal 32 Ayat 4 Undang-Undang Yayasan menerangkan bahwa:

“Dalam hal pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) selama menjalankan tugas melakukan tindakan yang oleh Pembina dinilai merugikan Yayasan, maka berdasarkan keputusan Rapat Pembina, pengurus tersebut dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir”.⁴⁴

Pasal 35 Ayat 5 Undang-Undang Yayasan menerangkan bahwa:

“Setiap pengurus bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, yang mengakibatkan

kerugian Yayasan atau pihak ketiga”.⁴⁵

Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Yayasan menerangkan bahwa:

“Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian pengurus dan kekayaan Yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota pengurus secara tanggung renteng bertanggungjawab atas kerugian tersebut”.⁴⁶

Jika kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Pengawas dalam melakukan tugas pengawasan dan kekayaan Yayasan tidak cukup untuk menutupi kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota Pengawas secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Namun jika dapat membuktikan kerugian tersebut bukan karena kesalahan dan kelalaiannya, tidak bertanggungjawab secara renteng atas kerugian tersebut. Hal ini disebutkan dalam Undang-Undang Yayasan Pasal 47 Ayat 1 dan Ayat 2.⁴⁷

Jika pengurus atau pengawas Yayasan melakukan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku atau ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Yayasan, pembina memiliki dasar untuk memberhentikan mereka.⁴⁸

Artinya apabila pengurus dan pengawas dalam melaksanakan kewajibannya tidak bertanggungjawab dan tidak beritikad baik maka kemudian mengakibatkan kerugian bagi Yayasan maka sebagai konsekuensi dengan merujuk pada ketentuan anggaran dasar dan menurut ketentuan dalam Pasal 35 ayat (5)

⁴² Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum, Wacana Intelektual, Cetakan ke II, 2016.h. 301.

⁴³ Shanti Wulandari, “Pertanggungjawaban Organ Yayasan Terhadap Kerugian Bidang Pendidikan Di Indonesia”, *Perspektif*, Volume XXI, Nomor 1, January, Tahun 2016, h.76.

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Pasal 32 ayat (4).

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Pasal 35 ayat (5).

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Pasal 39 ayat (1).

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Pasal 47 ayat (1) dan (2).

⁴⁸ Shanti Wulandari, *Op, Cit.*, h.76.

Undang-Undang Yayasan dapat menjatuhkan sanksi, bahwa setiap pengurus bertanggung jawab secara pribadi.⁴⁹

b. Apabila Pengurus dan Pengawas melakukan rangkap jabatan Pasal 31 Ayat 3 Undang-Undang Yayasan menerangkan bahwa “Pengurus tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengawas”. Hal ini berlaku bukan hanya pada Pengurus dan Pengawas namun juga berlaku bagi Pembina. Misalnya, anggota pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota pengurus dan/atau anggota pengawas, dan begitu pula sebaliknya.⁵⁰

Sama halnya dengan organ Yayasan lainnya yaitu pengurus dan Pembina, Pengawas juga dilarang dalam melakukan rangkap jabatan didalam Yayasan. Dalam pasal 40 Ayat 4 dijelaskan larangan tersebut yang berbunyi “pengawas tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau pengurus”⁵¹.

Setiap organ Yayasan dilarang melakukan rangkap jabatan dalam satu Yayasan. Larangan rangkap jabatan bertujuan untuk menghindari kemungkinan tumpang tindih kewenangan, tugas, dan tanggung jawab antar organ Yayasan agar tidak merugikan kepentingan Yayasan atau pihak lain. Syarat ini sebenarnya ada dengan tujuan agar tidak terjadi konflik kepentingan di dalam Yayasan itu sendiri. Jika dianalisis, sejatinya adanya tiga organ yayasan tersebut bagaikan *triumvirat* yang menjaga keseimbangan Yayasan.⁵²

Masing-masing organ Yayasan punya kewenangan yang saling berkaitan. Misalnya, pengawas mengawasi dan memberi nasihat ke pengurus, sedangkan pembina mengangkat dan memberhentikan pengurus dan pengawas. Larangan perangkapan jabatan dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan tumpang tindih kewenangan, tugas, dan tanggung jawab antara Pembina, Pengurus dan Pengawas yang dapat merugikan kepentingan Yayasan atau pihak lain.

c. Jika Pengurus melakukan kegiatan diluar tugas dan kewenangannya Ada beberapa hal yang diatur dalam Undang-Undang Yayasan dalam Pasal 37 Ayat 1 mengenai hal-hal yang tidak boleh dilakukan Pengurus karena diluar kewenangannya yang menerangkan bahwa “pengurus tidak berwenang mengikat Yayasan sebagai penjamin utang, mengalihkan kekayaan Yayasan kecuali dengan persetujuan Pembina dan membebani kepentingan Yayasan untuk kepentingan pihak lain”.⁵³

Berdasarkan dasar tersebut dapat ditarik kesimpulan jika pengurus memiliki batasan dalam melakukan perbuatan hukum mewakili Yayasan yang memang sengaja dibuat dalam anggaran dasar dan tertera dalam Undang-undang untuk menghindari penyalahgunaan wewenang. Dalam hal pengalihan aset pun tidak diperkenankan kecuali mendapat izin langsung dari pembina Yayasan. Sehingga apabila pengurus melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Yayasan,

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Pasal 35 ayat (5).

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Pasal 31 ayat (3).

⁵¹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Pasal 40 ayat (4).

⁵² Xavier Nugraha, “Analisis Terhadap Ketua Yayasan yang Rangkap Jabatan Di Indonesia: Sebuah Potensi Konflik Kepentingan (Analysis of Head of Foundation with Concurrent Positions in Indonesia: a Potential conflict of Interest)”, *Doktrina: Journal of Law*, Volume 3, Nomor 2, Oktober, Tahun 2020, h. 167.

⁵³ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Pasal 37 ayat (1).

anggaran dasar dapat membatasi hal tersebut dengan menentukan bahwa untuk perbuatan hukum tertentu diperlukan persetujuan terlebih dahulu dari pembina ataupun pengawas.⁵⁴

d. Jika Pengurus Tidak Memberikan Laporan Tahunan Yayasan Dengan Sebenar-benarnya Kepada Pembina Dan Pengawas Tidak Mengawasi Laporan Tahunan Keuangan Yayasan Ketentuan mengenai kewajiban pengurus dalam menyusun dan membuat laporan tahunan keuangan kepada Pembina terdapat dalam Pasal 49 Ayat 1 yang berbunyi:

“Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal, tahun buku Yayasan ditutup, pengurus wajib menyusun laporan tahunan secara tertulis yang memuat sekurang-kurangnya yaitu laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai dan laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan.⁵⁵

Dalam Pasal 50 Ayat 3 menjelaskan bahwa “laporan tahunan mengenai kegiatan dan aktivitas keuangan Yayasan disahkan oleh Pembina”. Dalam hal dokumen dalam laporan tahunan yang telah dilaporkan ternyata tidak benar dan menyesatkan, maka pengurus dan pengawas secara tanggung renteng bertanggungjawab terhadap pihak yang dirugikan, hal ini terdapat dalam Pasal 51 Undang-Undang Yayasan.⁵⁶

Selanjutnya tugas pengawas adalah mengawasi laporan tahunan mengenai kegiatan dan keuangan Yayasan disusun oleh

pengurus dan diawasi oleh pengawas, dimana pada setiap laporan tahunan yang diberikan dan dilaporkan harus turut ditandatangani oleh pengawas sesuai dengan anggaran dasar Yayasan sebelum disahkan oleh Pembina, terdapat dalam Pasal 50 Ayat 1 Undang-Undang Yayasan.⁵⁷

Sehingga jika dokumen yang ada dalam laporan tahunan tersebut tidak benar dan menyesatkan, maka yang bertanggungjawab dalam hal ini adalah pengurus dan pengawas. Kedua organ Yayasan ini wajib bertanggungjawab secara renteng terhadap pihak yang telah dirugikan dalam hal ini. Terdapat dalam Pasal 51 Undang-Undang Yayasan.⁵⁸

Mengenai laporan tahunan ini, sama halnya dengan kasus pada putusan pengadilan yang sedang diteliti, bahwa salah satu yang menjadi penyebab pengurus dan pengawas diberhentikan oleh Pembina melalui rapat Pembina adalah karena tidak memberikan atau melaporkan laporan tahunan mengenai kegiatan dan keuangan Yayasan kepada Pembina.⁵⁹

Dari ketentuan dalam beberapa pasal diatas, dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu yang menyebabkan pengurus dan pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu adalah juga dengan keputusan Rapat Pembina Yayasan, karena segala keputusan ada pada Pembina dan terlebih lagi Pembina adalah organ yang paling tinggi kedudukannya pada Yayasan. Serta Pengurus dan Pengawas harus melakukan

⁵⁴ Christ Aldo Susanto, “Kewenangan Pengurus Yayasan Atas Peralihan Hak Atas Tanah Milik Yayasan (Studi Kasus pada Yayasan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada)”, *Privat Law*, Volume 9, Nomor 1, Januari-Juni, Tahun 2021, h.94.

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Pasal 49 ayat (1).

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

⁵⁹ Putusan Nomor: 238/PDT/2022/PT SBY

kepengurusan terhadap Yayasan beserta jabatan yang diembannya dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab, yang menunjukkan bahwa kedua organ Yayasan ini melakukan tugasnya berdasarkan pada prinsip *fiduciary duty*.⁶⁰

Penekanan pada itikad baik ini adalah dilihat dari hubungan yang dibangun antara Yayasan, Pengurus dan Pengawas Yayasan yang harus menampilkan adanya hubungan kepercayaan (*fiduciary relationship*) yang menjadi dasar timbulnya *fiduciary duty* bagi Pengurus dan Pengawas tersebut.⁶¹

Namun, pembehentian anggota pengurus dan pengawas Yayasan tetap harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan dan harus memastikan prinsip kepastian hukum serta memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk memberikan klarifikasi atau membela diri. Proses pemecatan yang adil dan transparan penting untuk menjaga integritas tata kelola Yayasan dan memastikan keberlanjutan dan efektivitas Yayasan dalam mencapai tujuan mereka.⁶²

C. Legalitas Rapat Luar Biasa Pembina Yayasan Yang Memutuskan Pemberhentian Pengurus Dan Pengawas Yayasan Sosial Budi Mulia Abadi

1. Kedudukan Rapat Luar Biasa Pembina Dalam Sistem Pengambilan Keputusan Yayasan

Rapat Luar Biasa (RLB) adalah “rapat yang diadakan di luar jadwal rapat rutin atau rapat tahunan. Dalam konteks Yayasan, RLB dapat dilakukan untuk membahas dan mengambil keputusan penting yang tidak dapat ditunda hingga rapat rutin berikutnya”.

Salah satu keputusan yang dapat dibahas dan diambil dalam RLB adalah pemberhentian terhadap Pembina dan Pengurus Yayasan.⁶³

Rapat Pembina memiliki kedudukan yang khusus dilakukan oleh pembina saja, rapat ini dapat dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 tahun. Pembina bertugas untuk mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan evaluasi tentang kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang.⁶⁴

Rapat Luar Biasa Pembina dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan dan dalam pelaksanaannya Rapat Luar Biasa hanya dapat dilakukan oleh Pembina yayasan untuk memutuskan sesuatu yang mendesak yang tidak bisa ditunda lagi demi menjaga tetap tercapainya tujuan yayasan. Kedudukan rapat pembina dalam mengambil keputusan sangat penting karena Pembina yayasan merupakan entitas yang memiliki wewenang tinggi dalam menentukan kebijakan yayasan. Berikut adalah beberapa faktor penting mengenai kedudukan rapat pembina dalam mengambil keputusan:

- a) Pembina yayasan memiliki wewenang tertinggi dalam yayasan dan berperan sebagai pengambil keputusan utama. Mereka memiliki otoritas untuk mengesahkan kebijakan dan keputusan penting.
- b) Pembina yayasan dapat merancang dan menetapkan kebijakan yayasan, termasuk mengubah atau memutuskan perubahan pada anggaran dasar atau peraturan yayasan kecuali maksud dan tujuan yayasan.

⁶⁰ Eldo Fransixco Dumanauw, “Kewajiban Dan Tanggung Jawab Organ Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan”, *Lex Et Societatis*, Vol. VII, No. 9, September, 2019, h. 27.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*, h. 34.

⁶³ Diakses melalui <http://yapendikqpiib.or.id/tugas-dan-wewenang-pembina/> pada tanggal 2 Juli 2019 pukul 15.15 WIB.

⁶⁴ *Ibid.*

- c) Memiliki wewenang untuk memberhentikan dan mengangkat pengurus dan pengawas yayasan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam UUY dan Anggaran dasar Yayasan.
- d) Keputusan penting seperti perubahan strategi, program, atau kebijakan harus mendapat persetujuan atau disetujui dalam rapat pembina.
- e) Kedudukan rapat pembina harus selalu mempertimbangkan kepentingan terbaik yayasan guna mencapai maksud dan tujuan yayasan.⁶⁵

Selain itu Pasal 8 Huruf c Anggaran Rumah Tangga Yayasan Sosial Budi Mulya Abadi menyebutkan bahwa “Rapat Luar Biasa dilaksanakan apabila terjadi penyimpangan dan atau berhentinya kegiatan Yayasan selama 1 (satu) tahun berturut-turut”,⁶⁶ yang mana dalam Rapat Luar Biasa yang dilakukan akan dihadiri oleh anggota Pembina yayasan dan dalam pengambilan keputusan akan dinyatakan sah apabila $\frac{1}{2}$ dari anggota Pembina yang hadir menyetujui keputusan tersebut.⁶⁷

2. Konflik Internal Yayasan Sosial Budi Mulya Abadi

Titik sengketa permasalahan antara Pembina dengan Pengurus dan Pengawas yayasan Sosial Budi Mulya Abadi berawal saat adanya pemberhentian pengurus dan pengawas yang dilakukan oleh Pembina berdasarkan keputusan Rapat Luar Biasa Pembina dalam hal pengurus diketahui berada diluar Negeri selama 2 tahun yang menyebabkan berhentinya kegiatan yayasan karena segala persetujuan kegiatan yayasan harus ditandatangani oleh Ketua Pengurus.

Selain itu Pengurus juga diketahui tidak menyerahkan laporan tahunan keuangan yayasan sehingga dianggap merugikan yayasan yang mana dalam UUY dijelaskan

bahwa pengurus wajib menyerahkan laporan tahunan keuangan yayasan kepada Pembina. Sementara itu Pengawas diketahui telah lalai mengawasi Ketua Pengurus yayasan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam jabatannya sebagai organ yayasan.

Pemberhentian tersebut dianggap oleh Ketua Pengurus dan Pengawas tidak sah karena mereka merasa telah melakukan tugas dan kewenangan sesuai dengan UUY dan AD Yayasan serta masa jabatan mereka sebagai organ yayasan belum berakhir. Hal ini menyebabkan Pengurus dan Pengawas melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya dimana dalam putusannya menyatakan perbuatan Pembina melawan hukum tidak melawan hukum. Selanjutnya Pembina yayasan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya yang memutuskan bawa perbuatan Pembina melakukan rapat Luar Biasa adalah sah secara hukum.

Adanya permasalahan terkait perbedaan putusan antara Pengadilan Negeri dan pengadilan tinggi membuat hal ini perlu dikaji kembali mengenai bagaimana kepastian hukum terhadap pemberhentian pengurus dan pengawas yayasan Sosial Budi Mulya Abadi yang dilakukan oleh Pembina melalui Rapat Luar Biasa Pembina yang mana pada Putusan Pengadilan Negeri menyatakan RLB yang dilakukan Pembina adalah perbuatanmelawan hukum. Namun, tidak ditemukan unsur melawan hukum dalam pelaksanaan rapat tersebut. Sehingga Pembina melakukan banding dan putusan

⁶⁵ Siti Aisyah, Tiurma Mangihut Pitta Allagan, Mohamad Fajri Mekka Putra, “Pernyataan Keputusan Rapat Atas Pemberhentian Ketua Yayasan Am Pada Rapat Pembina Yang Cacat Hukum Berdasarkan Putusan Nomor 643/Pdt.P/2019/Pn.Dps”, *Indonesian Notary*, Vol. 4, No. 2, Tahun 2022, h. 1005.

⁶⁶ Akta Nomor 6 tanggal 18 Juni 2010 Anggaran Rumah Tangga Yayasan Sosial Budi Mulya Abadi.

⁶⁷ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Pasal 20 ayat (1), (2) dan (3).

Pengadilan tinggi menyatakan RLB yang dilakukan Pembina sah secara hukum.

Adapun ketentuan hukum yang dilanggar oleh Pengurus dan Pengawas adalah Pasal 8 huruf c Anggaran Rumah Tangga Yayasan Sosial Budi Mulia Abadi dengan tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik sehingga menyebabkan berhentinya kegiatan yayasan selama 2 tahun, selanjutnya Pasal 35 ayat (1) bahwa "setiap pengurus menjalankan tugas dengan itikad baik, dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan tujuan yayasan", serta Pasal 40 ayat (1) bahwa "Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan"⁶⁸, dalam hal ini Pengawas dinilai lalai menjalankan tugasnya karena tidak menegur dan mengawasi Pengurus dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

3. Legalitas Rapat Luar Biasa Pembina Yayasan Sosial Budi Mulia Abadi Yang Memutuskan Pemberhentian Pengurus Dan Pengawas Yayasan

Undang-Undang Yayasan mengatur mengenai legalitas rapat Pembina yang dapat dilakukan pembina untuk melakukan pemberhentian terhadap pengawas dan pengurus yayasan. Pasal 28 Ayat 1 menyatakan bahwa "Pembina mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada anggota Pengurus atau anggota Pengawas oleh Undang-Undang atau Anggaran Dasar ini".⁶⁹ Kewenangan Pembina yang terdapat dalam Pasal 28 Ayat 2 yaitu :

1. Memutuskan mengenai perubahan Anggaran Dasar Yayasan;

2. Mengangkat dan memberhentikan anggota Pengurus dan anggota Pengawas;
3. Menetapkan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar;
4. Mensahkan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan
5. Menetapkan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.⁷⁰

Undang-Undang Yayasan menjelaskan bahwa Rapat Pembina adalah "sah jikalau lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota Pembina hadir atau diwakili dalam rapat anggota, anggota Pembina dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Pembina lainnya dengan surat kuasa". Semua keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah mufakat, dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota Pembina Kecuali apa ditentukan lain dalam Anggaran Dasar. Hal ini terdapat dalam Pasal 20 Ayat 1, 2 dan 3.⁷¹

Sementara itu Undang-Undang Yayasan tidak mengatur tentang bagaimana prosedur yang harus dipatuhi dan dilakukan oleh para Pembina Yayasan untuk melakukan Rapat Luar Biasa, namun ketentuan-ketentuan mengenai hal-hal yang tidak diatur dalam Undang-Undang Yayasan untuk kepentingan dan kesejahteraan Yayasan haruslah diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan.

Anggaran Dasar Yayasan Sosial Mulia Abadi juga mengatur beberapa ketentuan yang harus dipatuhi oleh Organ Yayasan. Beberapa Pasal tersebut salah satunya

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Pasal 35 Ayat (1) dan Pasal 40 ayat (1)

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Pasal 28 ayat (1).

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Pasal 28 ayat (2).

⁷¹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Pasal 20 ayat (1), (2) dan (3).

adalah Pasal 8 Huruf c Anggaran Rumah Tangga Yayasan Sosial Budi Mulya Abadi sebagaimana Akta Nomor 6 tanggal 18 Juni 2010, yang dibuat dan disahkan oleh Yanita Poerbo Notaris di Kota Surabaya, yang berbunyi :⁷²

“Rapat Luar Biasa dilaksanakan apabila terjadi penyimpangan dan atau berhentinya kegiatan Yayasan selama 1 (satu) tahun berturut-turut”.

Apabila benar Pengurus dianggap melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, yang dianggap merugikan Yayasan, maka seharusnya diadakan Rapat Gabungan untuk memutuskan sanksi bagi Pengurus yang harus dihadiri oleh Pembina, Pengawas, Pengurus dan Penasehat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Ayat 5 Anggaran Rumah Tangga Yayasan, yang berbunyi :

“Pengurus yang melanggar anggaran dasar/anggaran rumah tangga, sehingga merugikan Yayasan akan diberi sanksi. Sanksi tersebut akan diputuskan oleh rapat gabungan yang dihadiri oleh Pembina, Pengawas, Pengurus dan Penasehat”.⁷³

Pengiriman undangan untuk dilakukannya Rapat Luar Biasa terhadap anggota Pembina juga ditentukan dalam Anggaran Dasar Yayasan sebagaimana diatur pada Pasal 10 Ayat 3 Anggaran Dasar Yayasan Sosial Budi Mulya Abadi, bahwa :

“Panggilan untuk Rapat Pembina harus dilakukan dengan surat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan menyebutkan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat serta keterangan singkat tentang hal-hal yang akan dibicarakan”⁷⁴

Pasal 9 Huruf a Anggaran Rumah Tangga Tentang Undangan Tata Tertib rapat menyebutkan :

“4 (empat) hari sebelum rapat dilaksanakan undangan harus disampaikan kepada yang bersangkutan”.

Pembina Yayasan memiliki kewenangan untuk mengadakan RLB dan mengambil keputusan terkait pemberhentian terhadap pembina dan pengurus Yayasan. Namun, dalam melaksanakan kewenangan ini, pembina harus tetap mematuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Yayasan dan Anggaran Dasar Yayasan tersebut.⁷⁵

Anggaran Dasar Yayasan merupakan “dokumen penting yang mengatur tentang pengelolaan dan tata cara pengambilan keputusan dalam Yayasan”. Prosedur pelaksanaan RLB dan pemberhentian terhadap pembina dan pengurus Yayasan harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Oleh karena itu, penting bagi yayasan untuk memiliki Anggaran Dasar yang jelas dan mengatur secara detail mengenai tata cara pengadilan RLB dan pemberhentian anggota Yayasan.⁷⁶

Dari beberapa pasal Anggaran Dasar diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur atau ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan Sosial Mulya Abadi dalam melakukan Rapat Luar Biasa yang dilakukan Pembina yayasan adalah harus dilakukan jika kegiatan yayasan sudah berhenti selama 1 (satu) tahun yang dalam kasus ini kegiatan yayasan sudah berhenti selama 2 tahun, karena hal tersebut telah melanggar UUY dan Anggaran Dasar Yayasan maka dilakukanlah RLB untuk memberhentikan Pengurus dan Pengawas yayasan karena tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya

⁷² Akta Nomor 6 tanggal 18 Juni 2010 Anggaran Rumah Tangga Yayasan Sosial Budi Mulya Abadi.

⁷³ Akta Nomor 6 tanggal 18 Juni 2010 Anggaran Rumah Tangga Yayasan Sosial Budi Mulya Abadi.

⁷⁴ Akta Nomor 6 tanggal 18 Juni 2010 Anggaran Rumah Tangga Yayasan Sosial Budi Mulya Abadi.

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ Robi Krisna, “Tinjauan Hukum Pendirian Yayasan Sebagai Badan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004”, *Jurnal Sosial dan Ekonomi*, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2021, h. 42.

dengan baik yang menimbulkan kerugian terhadap yayasan. Untuk dilakukannya RLB maka panggilan untuk Rapat Pembina harus dilakukan dengan surat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dan 4 (empat) hari sebelum rapat dilaksanakan undangan harus disampaikan kepada yang bersangkutan, sehingga dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam UUY dan Anggaran Dasar Yayasan.

D. Kepastian Hukum Terhadap Pemberhentian Pengurus Dan Pengawas Yayasan Dalam Putusan PN Nomor: 661/PDT.G/2021/PN.SBY DAN PUTUSAN PT NOMOR: 238/PDT/2022/PT.SBY

Titik sengketa terkait Putusan PN Nomor: 661/Pdt.G/2021/PN.SBY dan Putusan PT Nomor: 238/PDT/2022/PT.SBY adalah ketidak terimaan Pengurus dan Pengawas terhadap pemberhentian mereka yang dilakukan oleh Pembina melalui Rapat Luar Biasa. Pembina dianggap melawan hukum karena pemberhentian tersebut dianggap tidak sah dan tidak sesuai dengan Undang-Undang serta Anggaran Dasar yayasan. Pengurus dan Pengawas yayasan telah mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum, sedangkan sangkalan Pembina yayasan telah mendalilkan bahwa perbuatannya sudah sesuai dengan prosedur AD dan UUY.

Pengurus dan Pengawas yayasan akan dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Pembina Yayasan akan dibenani untuk membuktikan dalil sangkalannya tersebut. Pembina yang merasa Putusan PN yang menyatakan

perbuatannya melawan hukum mengajukan banding ke PT dan menyatakan perbuatan Pembina adalah sah dan tidak melawan hukum. adanya perbedaan yang bertolak belakang antara Putusan PN dan Putusan PT dianggap perlu dikaji terkait kepastian hukum pemberhentian Pengurus dan Pengawas yayasan Sosial Budi Mulia Abadi.

Herlien Budiono mengungkapkan bahwa “kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi semua orang”.⁷⁷

Kepastian hukum jika dilihat dari putusan hakim dalam proses peradilan, maka ia tidak lain adalah apa yang dapat atau boleh diperbuat oleh seseorang dan sejauh mana seseorang itudapat bertindak tanpa mendapat hukuman atau akibat dari perbuatan yang dikehendaki. Dalam konteks demikian kepastian hukum dapat berarti keamanan hukum, yang artinyamelindungi para pihak terhadap tindakan sewenang-wenang hakim dalam proses keadilan.⁷⁸

Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan produk penegak hukum yang berdasarkan pada fakta persidangan yang juga relevan secara yuridis, serta lahir dari proses penyelesaian perkara. Hakim dituntut untuk mampu menginterpretasikan makna suatu aturan perundang-undang atau pun peraturan lain yang dijadikan dasar putusannya.⁷⁹

Hukum dalam penerapannya harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dituntut untuk mengkonstruksikan

⁷⁷ Rifqi Qowiul Imam badilag, “Putusan Hakim, antara Kepastian Hukum dan Keadilan”, diakses melalui <https://badilag.mahkamahagung.go.id/> pada tanggal 14 Oktober 2023 pukul 20.10 WIB, h. 15.

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Rifqi Qowiul Imam badilag, *Op., Cit.*, h. 16.

perkara yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif. Putusan hakim yang berkepastian hukum akan melahirkan sumbangsih bagi perkembangan ilmu hukum. Hal ini dikarenakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap telah bertransformasi menjadi pendapat dari sebuah institusi bernama pengadilan dan selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi masyarakat.⁸⁰

Putusan Pengadilan Negeri memutuskan Pemberhentian yang dilakukan Pembina terhadap Pengurus dan Pengawas dianggap melawan hukum tentu tidak berdasar, karena alasan terjadinya pemberhentian tersebut telah jelas. Selain itu Pembina juga memiliki kewenangan untuk itu seperti yang terdapat dalam Pasal 15 Ayat (2) dan Pasal 15 Ayat (3) Huruf d Anggaran Dasar Yayasan menjelaskan bahwa :

“Pembina berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan Pengawas Yayasan Sosial Budi Mulia Abadi, termasuk memberhentikan mereka sebelum berakhirnya masa jabatan Pengurus dan Pengawas melalui Putusan Rapat Pembina”.⁸¹

Ketentuan dalam UUY Pasal 32 Ayat (4) menyatakan bahwa dalam hal Pengurus selama menjalankan tugas melakukan tindakan yang oleh Pembina dinilai merugikan Yayasan, maka berdasarkan Keputusan Rapat Pembina, pengurus tersebut dapat diberhentikan sebelum masa kepengurusan berakhir. Selanjutnya dalam Pasal 32 Ayat (5) disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, dan tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengurus diatur dalam anggaran dasar.⁸²

Melihat ketentuan dalam AD Yayasan Sosial Budi Mulia Abadi, hanya mengatur mengenai kewenangan Pembina untuk memberhentikan Pengurus. Mengenai bagaimana prosedur pemberhentian Pengurus hanya disebutkan pemberhentian berdasarkan kepada Keputusan Rapat Pembina, sedangkan mekanisme pemberhentian Pengurus oleh Pembina tidak diatur sama sekali dalam Anggaran Dasar.

Putusan Pengadilan Negeri mendalilkan bahwa Pembina melakukan perbuatan melawan hukum karena dalam melakukan pemberhentian terhadap pengurus dan pengawas tidak sesuai dengan UUY dan Anggaran Dasar yayasan. Hakim berpendapat bahwa pemberhentian tersebut seharusnya tidak masuk dalam agenda rapat dan tidak ada alasan yang diatur dalam Pasal 32 Ayat (4) UU Yayasan maupun AD & ART Yayasan, maka pemberhentian tersebut dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hukum sesuai Pasal 1365 KUH Perdata karena tidak ada dasar hukum sama sekali dan juga tidak terbaca dalam bukti-bukti mengenai alasan pemberhentian dimaksud sehingga perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Pengurus dan Pengawas dalam persidangan memberikan beberapa bukti yaitu memberikan laporan tahunan keuangan yayasan dari tahun 2016 sampai 2018, memberikan 5 bukti transfer uang kepada anggota yayasan yang dimaksudkan sebagai penyerahan uang arisan yayasan yang selama ini dipegang oleh pengurus.

Gugatan yang diajukan oleh pengurus dan pengawas bermaksud untuk membatalkan pemberhentian mereka dengan

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ Anggaran Dasar Yayasan Sosial Budi Mulia Abadi Pasal 15 ayat (1) dan (2)

⁸² Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Pasal 32 ayat (4).

berpatokan pada pasal 34 Ayat 2 UUY yang berbunyi :

“Pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian Pengawas tersebut dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pembatalan diajukan”.

Arti dari 30 hari sebagaimana dimaksud dalam kedua pasal tersebut diatas adalah “waktu proses pemeriksaan permohonan di Pengadilan yaitu sejak tanggal permohonan pembatalan diajukan bukan waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengawas atau Pengurus”.

Hal ini menjadi acuan bagi hakim dengan memutuskan bahwa Akta Nomor 4 tertanggal 04-11-2020 tentang Berita Acara Rapat Luar Biasa Pembina Yayasan Sosial Budi Mulia Abadi, yang dibuat oleh Nurmawan Hari Wismono Notaris Kabupaten Gresik yang pemberitahuan perubahan data Yayasan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 05-11-2020 (lima November dua ribu duapuluh) nomor AHU-AH.01.06-0021612 adalah cacat hukum, tidak sah, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta Pembina dalam melakukan pemberhentian terhadap pengurus dan pengawas adalah perbuatan melawan hukum.

Namun jika ditelaah kembali Putusan Pengadilan Negeri dalam pertimbangan Hakimnya tidak memberikan keterangan saksi yang dapat memperkuat dalil pengakuan dan pembuktian dari Pengurus dan Pengawas. Para tergugat selaku Pembina juga tidak diberi waktu untuk memberikan dalil sangkalannya berikut juga memberikan bukti-bukti dalam persidangan. Hal ini menjelaskan bahwa adanya

ketidakadilan Hakim dalam memberikan keputusan terhadap perkara Yayasan Sosial Budi Mulia Abadi ini yang terlihat dari minimnya bukti serta saksi juga tidak adanya pertimbangan terhadap eksepsi dan bukti dari tergugat. Karenanya Pembina mengajukan Banding dengan Putusan Nomor: 238/PDT/2022/PT.SBY

Pada Putusan Pengadilan Tinggi Hakim menilai bahwa gugatan Para Terbanding telah kadaluarsa karena Penggantian Pengurus dan Pengawas yang telah diberhentikan sebagaimana dalam Akta Nomor 4 tanggal 4 November 2021 Tentang Berita Acara Rapat Luar Biasa Pembina Yayasan Sosial Budi Mulia Abadi adalah sah dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan diterima sebagaimana suratnya Nomor AHU-AH.01.06-0021612 Perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Sosial Budi Mulia Abadi tanggal 5 November 2020. Sehingga pemberhentian Pengurus dan Pengawas dianggap sah. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1647 K/Sip/1997 tentang Gugatan yang diajukan oleh Pengurus Yayasan yang lama, yang kaidah hukumnya menyebutkan :

“Penggantian Pengurus Yayasan yang dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar adalah sah apabila susunan dewan Pengurus yang baru dimuat dalam tambahan Berita Negara RI, maka pengurus yang lama sudah berakhir masa tugasnya sehingga gugatan yang diajukan oleh pengurus yang lama harus ditolak”.

Selanjutnya Pembina diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil jawabannya terhadap gugatan pengurus dan pengawas pada pengadilan Negeri yang dinyatakan melawan hukum. Pembina meyakini bahwa dalam mengambil keputusan sudah melaksanakan prosedur

pemberhentian Pengurus sesuai Anggaran Dasar yayasan. Pasal 11 Ayat (2) Anggaran Dasar Yayasan Sosial Budi Mulia Abadi, telah ditentukan, bahwa:

“Anggota Pengurus diangkat oleh Pembina berdasarkan Keputusan Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak dari Pembina untuk sewaktu-waktu memberhentikan anggota Pengurus”.

Sedangkan menurut Pasal 11 Ayat (3) huruf d mengatur, bahwa

“Keanggotaan Pengurus berakhir karena diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina”.

Berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan Sosial Budi Mulia Abadi, Pembina juga berwenang mengangkat dan memberhentikan Pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (2) Anggaran Dasar Yayasan Sosial Budi Mulia Abadi yang menentukan, bahwa:

“Anggota Pengawas diangkat oleh Pembina berdasarkan Keputusan Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak Pembina untuk sewaktu-waktu memberhentikan Pengawas”.

Hak dan kewenangan Pembina dalam melakukan pemberhentian berikut juga pengangkatan Ketua Pengurus dan Pengawas terdapat dalam Pasal 28 ayat 2 poin a Undang-Undang Yayasan yaitu :

“Pembina berwenang melakukan pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan pengawas”⁸³

Pasal 32 Ayat 4 juga menyebutkan bahwa :

“Dalam hal Pengurus sebagaimana disebutkan dalam ayat, selama menjalankan tugas dinilai oleh Pembina merugikan Yayasan, maka berdasarkan Keputusan Rapat Pembina, Pengurus tersebut dapat

diberhentikan sebelum masa kepengurusannya berakhir”.⁸⁴

Karenanya didalam Undang-Undang Pembina memiliki hak dan kewenangan yang tidak diserahkan kepada Ketua Pengurus dan Pengawas. Namun jika pengangkatan, pemberhentian dan penggantian Pengurus tidak sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan, atas permohonan yang berkepentingan pengadilan dapat membatalkan pengangkat, pemberhentian dan penggantian tersebut dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak tanggal permohonan pembatalan diajukan, hal ini terdapat dalam Pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Yayasan.⁸⁵

Namun permohonan pembatalan yang telah dilakukan oleh pengurus dan pengawas pada gugatannya di Pengadilan Negeri dianggap Hakim Pengadilan Tinggi telah daluarsa karena perubahan data yayasan telah didaftarkan dan disahkan oleh KemenkumHam sehingga perubahan tersebut telah dianggap sah secara hukum.

Mengenai tata cara pemberitahuan perubahan Data Yayasan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan, dalam Pasal 19 yang berbunyi :

1. Pemberitahuan perubahan data Yayasan disampaikan kepada Menteri oleh Pengurus Yayasan atau kuasanya dengan melampirkan dokumen yang memuat perubahan tersebut.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal keputusan rapat atau tanggal kemudian yang ditetapkan dalam

⁸³ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

⁸⁴ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

⁸⁵ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Pasal 34 ayat (2).

keputusan rapat yang sah memutuskan perubahan data tersebut.

3. Menteri berdasarkan pemberitahuan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pencatatan perubahan data dan menerbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan data.⁸⁶

Pembina menerangkan bahwa alasan dilakukannya Rapat Luar Biasa tersebut selain untuk mengganti wakil ketua pengurus dan sekertaris yang telah meninggal juga untuk melakukan pemberhentian terhadap Ketua pengurus dan pengawas karena dianggap telah merugikan yayasan dan lalai dalam melaksanakan tugasnya.

Diketahui bahwa Ketua Pengurus sejak pandemi Covid berada diluar Negeri (Singapura), artinya selama 2 tahun beliau berada diluar negeri. Karenanya kondisi Yayasan dalam keadaan lumpuh, disebabkan adanya ketentuan Pasal 13 Ayat (3) Anggaran Dasar menentukan :

“Surat keluar harus ditandatangani oleh Ketua bersama dengan Sekretaris, sedangkan dalam hal pengeluaran dan atau penerimaan uang Surat yang bersangkutan ditandatangani oleh Ketua bersama dengan Bendahara”.⁸⁷

Sehingga dianggap perlu tindakan segera untuk memulihkan keadaan Yayasan, dengan mengganti Pengurus dan Pengawas melalui putusan Rapat Luar Biasa Pembina, sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan Sosial Budi Mulia Abadi.

Pasal 8 Huruf c Anggaran Rumah Tangga Yayasan sebagaimana Akta Nomor 6 tanggal 18 Juni 2010, yang dibuat dan disahkan oleh Yunita Poerbo Notaris di Kota Surabaya, yang berbunyi:

“Rapat Luar Biasa dilaksanakan apabila terjadi penyimpangan dan atau berhentinya kegiatan yayasan selama 1 tahun berturut-turut”.⁸⁸

Mengenai undangan rapat Pembina yang dituduhkan tidak sesuai dengan Anggaran Dasar yayasan karena dikirimkan kurang dari 7 (tujuh) hari sejak surat undangan tersebut tercatat tanggal 29 Oktober sedangkan rapat Pembina dilakukan pada tanggal 04 November 2020, sehingga kurang dari 7 (tujuh) hari sejak surat undangan dikirimkan. Namun diketahui bahwa pada bulan Oktober terdapat tanggal 31 (tiga puluh satu), sehingga undangan Rapat tersebut sampai kepada para Pembina kurang dari 7 (tujuh) hari dan tidak melanggar Anggaran Dasar Yayasan Sosial Budi Mulia Abadi Pasal 10 Ayat 3, yang berbunyi:

“Panggilan untuk Rapat Pembina harus dilakukan dengan surat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan menyebutkan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat serta keterangan singkat tentang hal-hal yang akan dibicarakan”.

Hakim dalam persidangan memberikan kesempatan kepada Pembina untuk memberikan bukti-bukti dan menghadirkan beberapa saksi selaku anggota arisan dan kegiatan sosial yang dilakukan yayasan yang dikira dapat mendukung pembenaran atas perbuatan melakukan pemberhentian terhadap Pengurus dan pengawas, yang selanjutnya membandingkan bukti-bukti tersebut dengan bukti yang dimiliki oleh Ketua Pengurus dan Pengawas.

Terdapat perbedaan pendapat Hakim mengenai bukti yang diajukan Ketua Pengurus dan Pengawas. Dimana, pada Putusan Pengadilan Negeri Ketua pengurus mengakui telah menyerahkan laporan

⁸⁶ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan.

⁸⁷ Anggaran Dasar Sosial Budi Mulia Abadi Pasal 13 Ayat (3).

⁸⁸ Akta Nomor 6 tanggal 18 Juni 2010 Anggaran Rumah Tangga Yayasan Sosial Budi Mulia Abadi.

keuangan tahunan kepada Pembina yaitu dari tahun 2016 sampai 2018 dan dibenarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri. Menurut Tjokro Saputrajaya selaku Ketua Umum Yayasan memberitahukan bahwa pengurus Yayasan telah selesai menyusun laporan buku tahun 2016 terlampir pula laporan keuangan Yayasan tahun buku 2016 untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Namun, surat laporan seperti itu bukan merupakan laporan tahunan, demikian pula isi laporan keuangan tahun 2017, laporan keuangan tahun 2018 dan laporan audit bukti bukan merupakan bukti laporan tahunan Pengurus tentang segala tindakan dan kegiatan Yayasan.

Artinya dalam fakta di persidangan dari bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh Pengurus tidak ada satupun bukti yang menyatakan bahwa Pengurus telah memberikan laporan keuangan tahunan kepada Pembina seperti yang telah disebutkan pada Putusan Pengadilan Negeri.

Pasal 12 Ayat 3 Angka (3) Anggaran dasar Yayasan Sosial Budi Mulia Abadi menentukan bahwa:

“Pengurus wajib melaporkan segala tindakan dan kegiatannya secara tertulis setiap tahun sekali kepada Pembina dan setiap kali diminta oleh Pembina”

Sedangkan ketidak taatan Pengurus terhadap kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar Yayasan merupakan bukti pelanggaran terhadap Anggaran Dasar Yayasan.

Pengawas yang diketahui telah lalai dalam menjalankan tugasnya yaitu mengawasi Ketua Pengurus dalam menjalankan tugasnya sehingga

menyebabkan kerugian pada yayasan dan tidak adanya aporan tahunan keuangan yayasan selama beberapa tahun. Hal ini dinilai melanggar Anggaran dasar yayasan yaitu selama 2 (dua) tahun berturut-turut tidak menyampaikan laporan tahunan Penggugat II sebagai Pengawas bertugas mengawasi pelaksanaan kebijakan pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan, serta memberikan nasihat kepada Pengurus baik diminta maupun tidak, agar dalam pelaksanaan kebijakannya pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan tidak melanggar ketentuan Anggaran Dasar.

Akibatnya Pengawas terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar yaitu melakukan rapat Pengawas yang dipimpin oleh Pengawas sesuai dengan tata cara rapat sebagaimana ditentukan Pasal 18 Akta Yayasan Sosial Budi Mulia Abadi Nomor 3 tanggal 23 April 2006 (Anggaran Dasar Yayasan Sosial Budi Mulia Abadi), atau bukti adanya tindakan sebagai Pengawas terhadap Ketua Pengurus atas pelanggaran yang dilakukannya terhadap anggaran dasar Yayasan Sosial Budi Mulia Abadi.

Hal ini terdapat dalam Pasal 40 Ayat 1 Undang-Undang Yayasan yaitu:

“Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan serta memberikan nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan”.⁸⁹

Keterangan saksi dari Pembina juga mendukung jawaban dan bukti-bukti yang diberikan Pembina. Saksi-saksi yang turut hadir adalah Njo Soe Jong dan Feny Wewengkang, keduanya merupakan anggota arisa yayasan Sosial Budi Mulia Abadi juga

⁸⁹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

anggota yang turut serta dalam setiap kegiatan sosial yang dilakukan yayasan. Kedua saksi menerangkan bahwa memang benar tidak ada kegiatan dalam yayasan selama 2 (dua) tahun terakhir dan tidak pernah melihat Ketua Pengurus berada di yayasan. Hal ini menurut Hakim juga telah membuktikan tidak adanya dilakukan Rapat Pengurus selama ini.

Mekanisme pemberhentian Pengurus dan Pengawas oleh Pembina dalam Anggaran Dasar Yayasan Sosial Budi Mulia Abadi memang tidak diatur prosedurnya. Namun beberapa tahapan yang harus dilakukan telah dijelaskan dalam Anggaran Dasar yayasan yaitu dimulai dari pengiriman undangan Rapat Pembina, dimana panggilan untuk Rapat Pembina harus dilakukan dengan surat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan (Pasal 10 Ayat 3 Anggaran Dasar), selanjutnya rapat Pembina dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Pembina (Pasal 18 ayat 2 UUY) yang artinya keputusan Rapat Luar Biasa Pembina sah karena perubahannya telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan diterima sebagaimana suratnya Nomor AHU-AH.01.06-0021612 Perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Sosial Budi Mulia Abadi tanggal 5 November 2020, dan Rapat Luar Biasa Pembina boleh karena telah berhentinya kegiatan yayasan selama 2 tahun berturut-turut yang menyebabkan kerugian yayasan.

Adanya perbedaan putusan pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dapat dilihat bahwa adanya perbedaan

penilaian Hakim dalam memutuskan suatu perkara yang sama. Hal ini tentu menjadi pertanyaan ditengah masyarakat, apakah Hakim dalam membuat putusan tidak mempertimbangkan bukti dan pernyataan kedua belah pihak secara adil sehingga terdapat perbedaan antara kedua putusan tersebut. Tentunya tujuan dari putusan Hakim adalah demi tercapainya kepastian hukum bagi para pihak yang sedang berperkara, maka dari itu Hakim dalam memberikan Putusan diharapkan harus secara adil agar tidak merugikan para pihak.

Seperti yang kita ketahui bahwa Putusan hakim dipengadilan sangat berpengaruh dalam memenuhi rasa keadilan terhadap para pihak yang berperkara.⁹⁰ Hakim juga dapat menjadikan keputusan-keputusan dari hakim terdahulu sebagai patokan untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam UU dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama. Adapun kasus yang sama dengan putusan ini adalah;

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor: 43/Pdt.G/2016/PN.Mgg. dengan Amar Putusan yang menyatakan perbuatan Pembina menerbitkan Surat Keputusan Pembina Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang No.042/PB-YKI/KEP/XI/2016 tentang pemberhentian Para Penggugat (Pengurus Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang masa bakti 2014-2019) tertanggal 6 November 2016 adalah Perbuatan Melawan Hukum dan Amar Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 359/PDT/2017/PT.SMG mengadili :

⁹⁰ Rijal Maulana Firdaus, "Analisis Mengenai Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana

Pembunuhan Berencana (Studi Putusan No : 51/PID.B/2012/PN.BTG)", Lex Crimen, Nomor 3, Volume II, Juli Tahun 2013, h. 167.

“Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 43/Pdt.G/2016/PN.Mgg yang dimohonkan banding”.⁹¹

- 2) Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 54/PDT/2021/PT DPS. Dalam kasus ini Pengurus tidak terima atas pemberhentian yang dilakukan Pembina, menurutnyasudah seharusnya Rapat Pembina tersebut memiliki alasan-alasan yang jelas dan kuat terkait dengan pemberhentian tersebut dan bukannya tanpa alasan yang jelas secara sewenang-wenang memberhentikan seseorang tanpa alasan apapun karena jika terjadi pemberhentian salah satu pengurus haruslah memiliki cukup alasan yang kuat sehingga seseorang tersebut dianggap sudah tidak layak menjabat. Tidak ada satu pun alasan dan/atau pembuktian yang menunjukkan bahwa Pembanding/Penggugat lalai dalam pengurusan Yayasan Taman Pendidikan Empat Lima/TP. 45 dan tidak pernah pula ditegur baik dalam bentuk surat maupun secara lisan atas sesuatu tindakan yang melanggar kewenangannya sebagai Ketua Umum Pengurus Yayasan Taman Pendidikan Empat Lima/TP.45 dan Amar putusan Pengadilan Tinggi Denpasar adalah menerima permohonan banding dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang dimohonkan banding dengan menghukum menolak gugatan Pembanding.⁹²

Menetapkan hubungan hukum bertitik tolak dari penetapan dan penegasan kepastian hukum yaitu dengan putusan akhir

yang salah satunya dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena terdapat beragam cacat formil yang menjadi dasar bagi Hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima antara lain adalah gugatan telah daluarsa.⁹³ Oleh karena itu teori kepastian hukum sangat tepat untuk penelitian ini karena akan menganalisis dan meneliti bagaimana kepastian hukum terhadap pemberhentian pengurus dan Pengawas terkait adanya perbedaan Putusan PN Nomor:661/Pdt.G/2021/PN.SBY dan Putusan PT Nomor: 238/PDT/2022/PT.SBY.

Adanya kepastian hukum maka tujuan dari para pihak akan tercapai dengan adil. Demi mencapai kepastian hukum maka dapat disimpulkan setelah membandingkan kedua putusan tersebut, Putusan Hakim dalam Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 238/PDT/2022/PT.SBY dinilai tepat, karena telah sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan Sosial Budi Mulia Abadi dan Undang-Undang Yayasan.

III. Kesimpulan

A. Kesimpulan

1. Ketentuan yang mengatur kewenangan Pembina melakukan pemberhentian terhadap Pengurus dan Pengawas terdapat pada Undang-Undang Yayasan yang dalam pasal-pasalny tegas menjelaskan bahwa salah satu kewenangan Pembina adalah “melakukan pengangkatan dan pemberhentian Pengurus dan Pengawas Yayasan. Pengurus Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali”.

⁹¹ Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor: 43/Pdt.G/2016/PN.Mgg.

⁹² Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 54/PDT/2021/PT DPS.

⁹³ Rifqi Qowiwul Imam badilag, *Ibid*, h. 18

Mengenai pemberhentian Pengurus Yayasan Pembina jugalah yang berhak melakukan pemberhentian terhadap pengurus Yayasan. Selanjutnya mengenai pengangkatan dan pemberhentian Pengawas juga diatur UUY bahwa "Pengawas Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dan Pengawas Yayasan dapat diangkat dan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina".

2. Legalitas Rapat Luar Biasa Pembina adalah sah dengan adanya Berita Acara Rapat Pembina yang dibuat oleh Notaris atau akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan yang dibuat dihadapan Notaris, serta Surat Pemberitahuan Penerimaan Perubahan Data Yayasan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam konteks Yayasan, RLB dapat dilakukan untuk membahas dan mengambil keputusan penting yang tidak dapat ditunda hingga rapat rutin berikutnya". Salah satu keputusan yang dapat dibahas dan diambil dalam RLB adalah pemberhentian terhadap pembina dan pengurus Yayasan. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 huruf c Anggaran Rumah Tangga Yayasan Sosial Budi Mulya Abadi, yang berbunyi: "Rapat Luar Biasa dilaksanakan apabila terjadi penyimpangan dan atau berhentinya kegiatan Yayasan selama 1 (satu) tahun.
3. Putusan yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri berbeda dengan Pengadilan Tinggi, namun pada dasarnya permasalahan yang terjadi

adalah ketidak terimaan Pengurus dan Pengawas atas RLB yang dilakukan Pembina. Perbedaan putusan inilah yang membuat kepastian hukum diperlukan, karena dengan adanya kepastian hukum maka tujuan dari para pihak akan tercapai dengan adil yang pada dasarnya gugatan yang dilakukan Pengurus dan Pengawas adalah mengenai kewenangan Pembina melakukan pemberhentian terhadap mereka sebelum masa jabatan mereka berakhir melalui RLB tanpa alasan yang jelas. Sementara itu kewenangan Pembina memberhentikan Pengurus dan Pengawas terdapat dalam UUY dan AD yayasan. Sehingga demi mencapai kepastian hukum maka dapat disimpulkan setelah membandingkan kedua putusan tersebut, maka Putusan Hakim dalam Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 238/PDT/2022/PT.SBY dinilai tepat, karena telah sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan Sosial Budi Mulya Abadi dan Undang-Undang Yayasan.

B. Saran

1. Diharapkan agar dalam sebuah Yayasan, setiap Organ Yayasan mematuhi segala peraturan yang ada baik Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan juga Undang-undang yayasan yang didalamnya telah di jelaskan apa saja tugas dan kewenagan organ yayasan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan organ yayasan dalam melaksanakan tugasnya. Jika setiap organ dapat memahami tugas dan kewenangannya dengan baik tentu akan meminimalisir terjadinya konflik antar organ dan

- kelalaian organ yayasan dalam menjalankan tugasnya.
2. Diharapkan bagi Pembina Yayasan dalam melaksanakan kewenangannya terutama dalam hal pemberhentian pengurus dan pengawas Yayasan akan lebih baik jika dilakukan Rapat Gabungan terlebih dahulu sebelum melakukan Rapat Luar Biasa, untuk mengetahui penyebab Pengurus dan Pengawas tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya. Seperti yang diketahui bahwa Ketua Pengurus berada di Luar Negeri selama 2 tahun dan segala kegiatan harus berdasarkan tanda tangan beliau, artinya kegiatan Yayasan sudah berhenti selama 2 tahun, sementara dalam ART Yayasan menyebutkan jika Yayasan sudah berhenti selama 1 tahun Pembina dapat melakukan RLB. Maka jika RLB dilakukan sesuai dengan ART kerugian yang diperoleh Yayasan akan lebih sedikit.
 3. Diharapkan Hakim dalam membuat putusan harus mempertimbangkan aspek sosiologis yaitu tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat untuk mencapai kepastian hukum yang adil bagi para pihak. Penerapan aspek tersebut sangat memerlukan pengalaman, pengetahuan serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan, Hakim harus mempertimbangkan alasan Pembina Yayasan memberhentikan Ketua Pengurus dan Pembina Yayasan dihubungkan dengan bukti tertulis maupun saksi di persidangan. Sehingga

kepastian hukum bagi para pihak dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007
- Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, UIN Suska Riau, Pekanbaru, 2015
- Ida Farida, "Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Sains dan Inovasi*, Nomor 06, Volume 01, Tahun 2010
- Irma Fatmawati, *Hukum Yayasan Pendidikan*, CV. Budi Utama, Sleman, 2020
- Johannes Ibrahim, *Hukum Organisasi Perusahaan Pola Kemitraan dan Badan Hukum*, PT. Refika Adimata, Bandung, 2013
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya, Bayu Media Publishing, 2005
- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Prenada Media Group, Depok, 2016
- Mas Ritonga, *Hukum Perusahaan Dan Bentuk-Bentuk Perusahaan Dilndonesia*, Guefedia, Jakarta, 2022
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004
- Mulhadi, *Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha Dilndonesia*, Edisi Pertama, Cetakan Ke-2, Rajawali Pers, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2006
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan 5, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009

B. Undang-undang

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum, Wacana Intelektual, Cetakan ke II, 2016
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan.

C. Jurnal

- Christ Aldo Susanto, "Kewenangan Pengurus Yayasan Atas Peralihan Hak Atas Tanah Milik Yayasan (Studi Kasus pada Yayasan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada)", *Privat Law*, Volume 9, Nomor 1, Januari-Juni, Tahun 2021
- Desi Handayani, Evi Haryani, Ida Ayu Putu Anggie, "Analisi Yuridis tentang Pendirian yayasan Pendidikan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan", *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Nomor 1, Volume 8, Tahun 2018
- Eldo Fransixco Dumanauw, "Kewajiban Dan Tanggung Jawab Organ Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan", *Lex Et Societatis*, Vol. VII, No. 9, September, 2019
- Fajar Rachmad Dwi Miarsa, Cholilla Adhaningrum Hazir, "Rechtsvacuum Atas Pengaturan Kekuasaan Pembina Yayasan", *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan seni*, Vol. 5, No. 2, Oktober 2021
- Henni Muchtar, "Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Universitas Negeri Padang*, Vol. XIV, Nomor 1, Tahun 2015
- Milya Sari, Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Pendidikan IPA", *Jurnal Natural Science*, Nomor 01, Volume 06, Tahun 2020
- Mitra Bestari Mudjiyanto, "Jurnal Ilmu Administrasi Publik", *Publisia*, Volume 1, Nomor 2, Oktober, Tahun 2016
- Murni, Abdul Gani, "Tanggung Jawab Hukum Kepada Pengurus Yayasan Terhadap Failednya Suatu Yayasan", *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*, Volume 6, Nomor 1, Januari, Tahun 2020
- Nurul Hidayanti, "Distribusi Aset Dan Kekayaan Yayasan: Perspektif Perundang-Undangan", *Universitas Andi Djemma Palopo*, Volume 6, Nomor 2, Desember, Tahun 2017
- Rijal Maulana Firdaus, "Analisis Mengenai Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan No : 51/PID.B/2012/PN.BTG)", *Lex Crimen*, Nomor 3, Volume II, Juli Tahun 2013
- Robi Krisna, "Tinjauan Hukum Pendirian Yayasan Sebagai Badan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004", *Jurnal Sosial dan Ekonomi*, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2021
- Sella Marsellena Mercury, "Analisis Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan", *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, Volume 2, Nomor 2, September 2021
- Shanti Wulandari, "Pertanggungjawaban Organ Yayasan Terhadap Kerugian Bidang Pendidikan Di Indonesia", *Perspektif*, Volume XXI, Nomor 1, January, Tahun 2016
- Siti Aisyah, Tiurma Mangihut Pitta Allagan, Mohamad Fajri Mekka Putra, "Pernyataan Keputusan Rapat Atas Pemberhentian Ketua Yayasan Am Pada Rapat Pembina Yang Cacat Hukum Berdasarkan Putusan Nomor 643/Pdt.P/2019/Pn.Dps", *Indonesian Notary*, Vol. 4, No. 2, Tahun 2022
- Xavier Nugraha, "Analisis Terhadap Ketua Yayasan yang Rangkap Jabatan Di Indonesia: Sebuah Potensi Konflik Kepentingan (Analysis of Head of Foundation with Concurrent Positions in Indonesia: a Potential conflict of Interest)", *Doktrina: Journal of Law*, Volume 3, Nomor 2, Oktober, Tahun 2020

D. Akta

- Akta Nomor 6 tanggal 18 Juni 2010 Anggaran Rumah Tangga Yayasan Sosial Budi Mulia Abadi.
Anggaran Dasar Sosial Budi Mulia Abadi

E. Putusan Pengadilan

- Putusan Nomor: 238/PDT/2022/PT SBY
Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor: 43/Pdt.G/2016/PN.Mgg.
Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 54/PDT/2021/PT DPS.

F. Internet

- <http://yapendikgpib.or.id/tugas-dan-wewenang-pembina/> pada tanggal 2 Juli 2019 pukul 15.15 WIB.